PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Email:djkd@kemendagri.go.id
http://keuda.kemendagri.go.id
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
KeudaGoDigital

SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD

(Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kewajiban Anggota DPRD

a. .....
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. .....

Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014

RESES

Menjaring Aspirasi pada Dapil	Menyiapkan Laporan Reses	Disampaikan Dalam Paripurna

Prinsip "*Money Follows Programs*"

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat

didanai dari

A P B N

Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

didanai dari

A P B D

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN

- PERPRES 18/2020
- PERPRES RKP 2021
- PMDN 86/2017
- PMDN 40/2020

PMDN NO 90/2019 jo. KEPMEN NO 050-3708/2020

PENGANGGARAN

- PP 12/2019
- PMDN 64/2020
- PMDN 77/2020
- PERDA POKOK-POKOK KEUDA

RPJMD → RKPD → KUA & PPAS → APBD

DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD

Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003	Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003	Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003	Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004	RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 23 ayat (2) PP 12/2019	APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD

Hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD MEMUAT

- pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan
- rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan
- agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 178
PMDN 86/2017

DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD,

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

TABEL TB-57
RUMUSAN USULAN PRORGAM/KEGIATAN
HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI
PROV/KAB/KOTA…

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						

Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

Pasal 54 huruf a PP 12/2018

PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM SIPD

FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN DALAM SIPD

PEMBUATAN AKUN DEWAN
Oleh akun Sekretaris Daerah

INPUT POKIR
oleh akun Anggota Dewan

VALIDASI SEKRETARIAT DPRD
oleh akun setara Kasubid

VALIDASI BAPPEDA
oleh akun Mitra Bappeda yang memangku Sekretariat DPRD

VALIDASI OPD TUJUAN
oleh akun setara Kasubid

VALIDASI TAPD

USULAN DISETUJUI

LANGKAH PERTAMA

- AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.

- DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR USERNAME, DAPIL, NOMOR HP, EMAIL, ALAMT DST. (USERNAME ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).
- NOMOR DAPIL **TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN POKIR** HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.

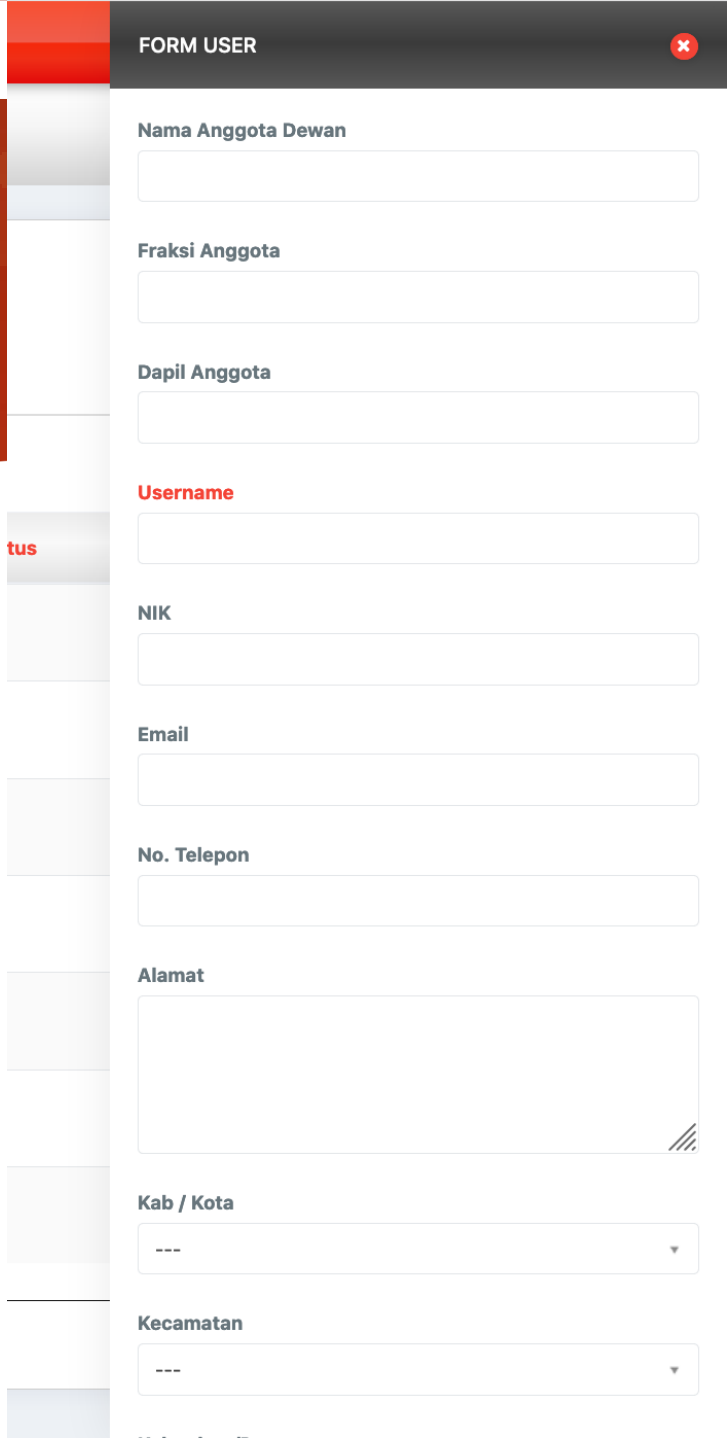

LANGKAH KEDUA

- SETELAH AKUN DEWAN DIBUAT, ANGGOTA DEWAN YBS MELAKUKAN LOGIN DENGAN MENGGUNAKAN USERNAME YANG SUDAH DIDAFTARKAN.
- LALU PILIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN, DAN PILIH MENU USULAN RESES/POKIR.
- KLIK + USULAN BARU UNTUK MENAMBAHKAN POKOK PIKIRAN.

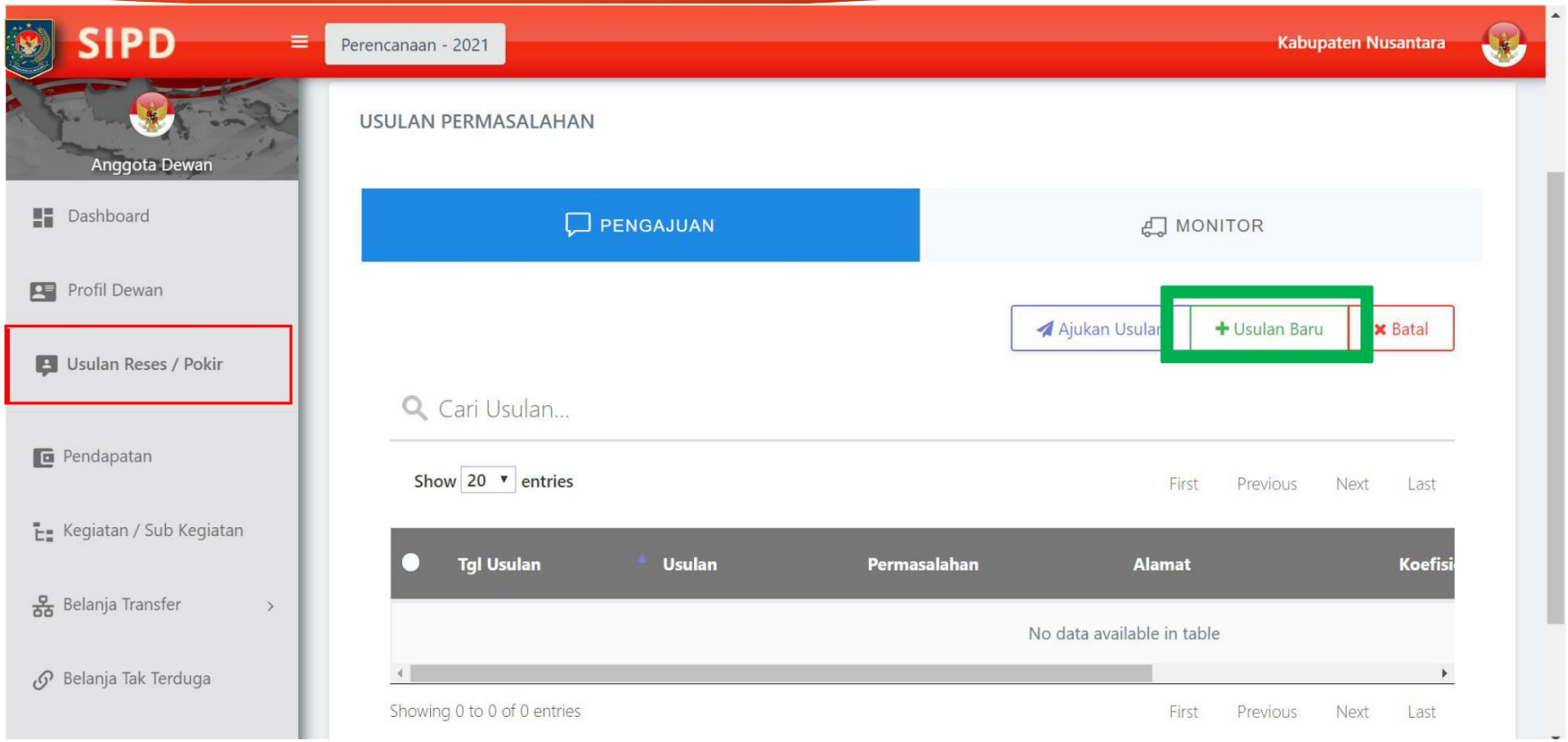

LANGKAH KETIGA

SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM,
LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN

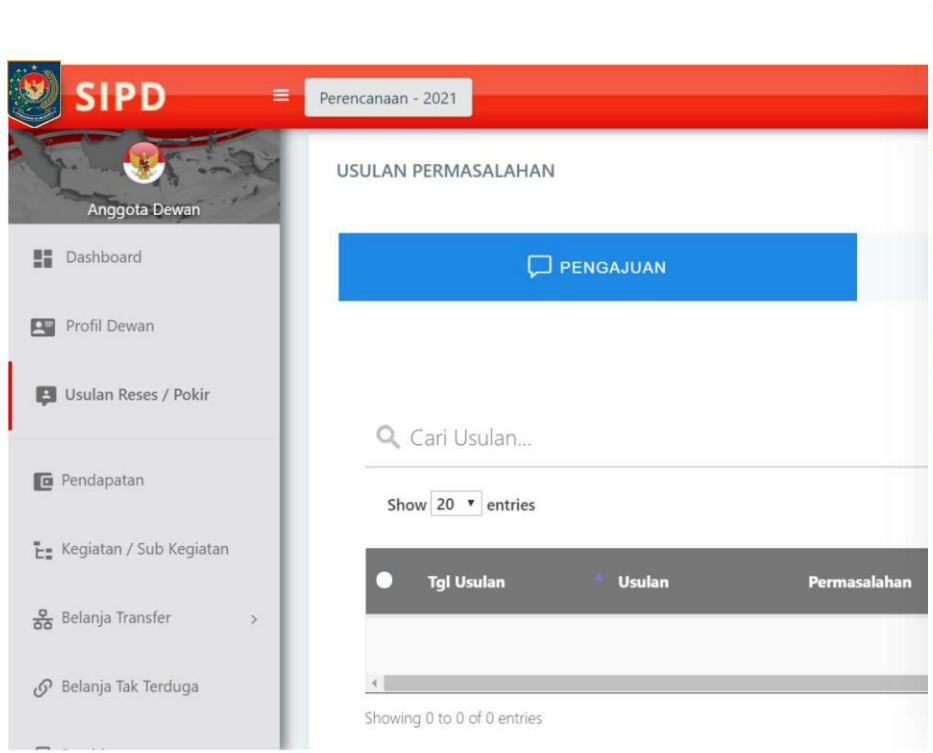

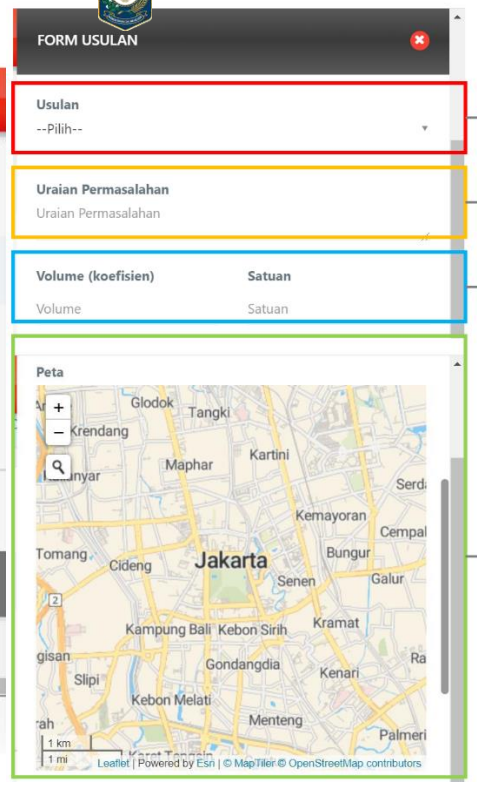

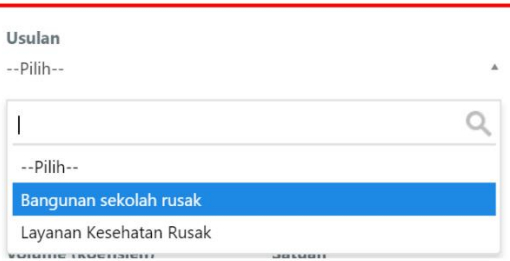

Pada Usulan, silahkan pilih daftar usulan yang tersedia berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan.

Jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan usulan yang sudah dipilih.

Input volume dan satuan sesuai dengan usulan.

Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta.

LANGKAH KEEMPAT

- SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG POKIT TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI POKIR KELEMBAGAAN.

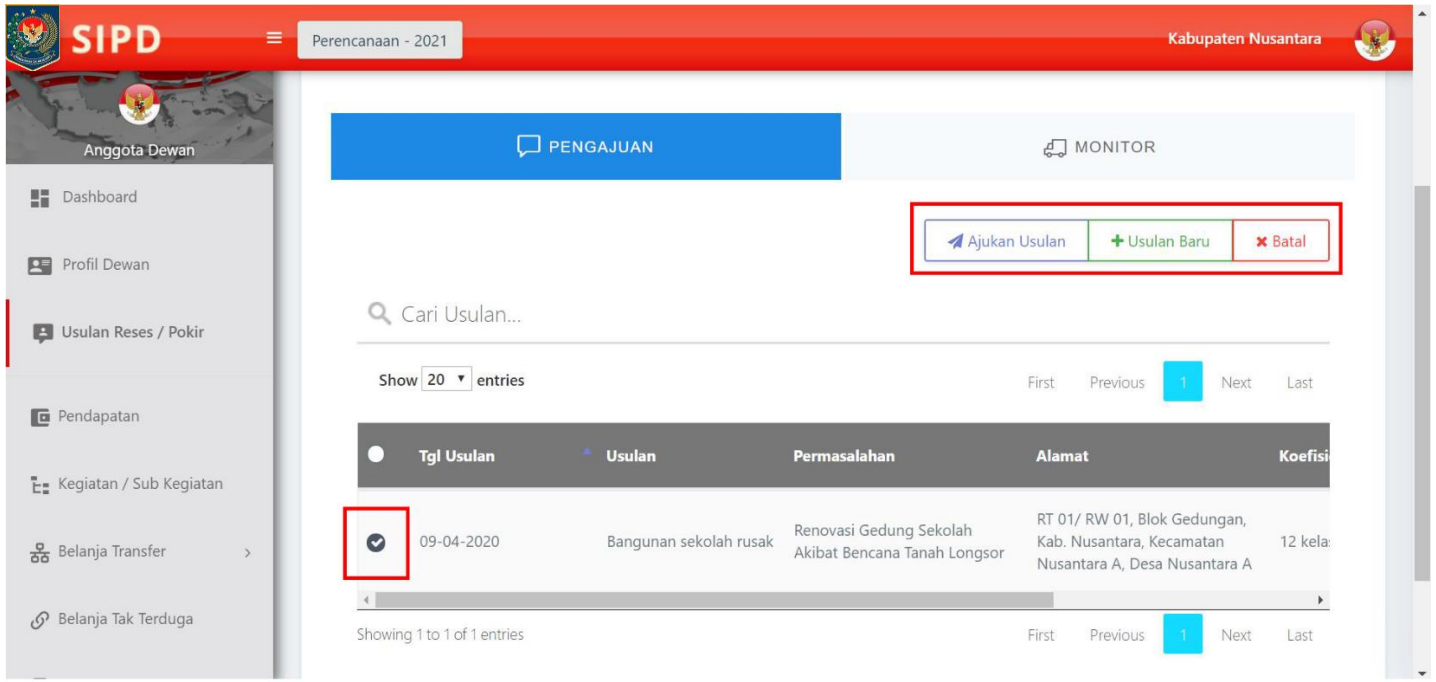

LANGKAH KELIMA

- SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN DAPAT MEMONITOR PROSES PENYAMPAIAN POKIR MELALUI MENU MONITOR.
- PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT DILIHAT PROGRESSNYA.
- PROSES PENYAMPAIAN POKIR DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN.

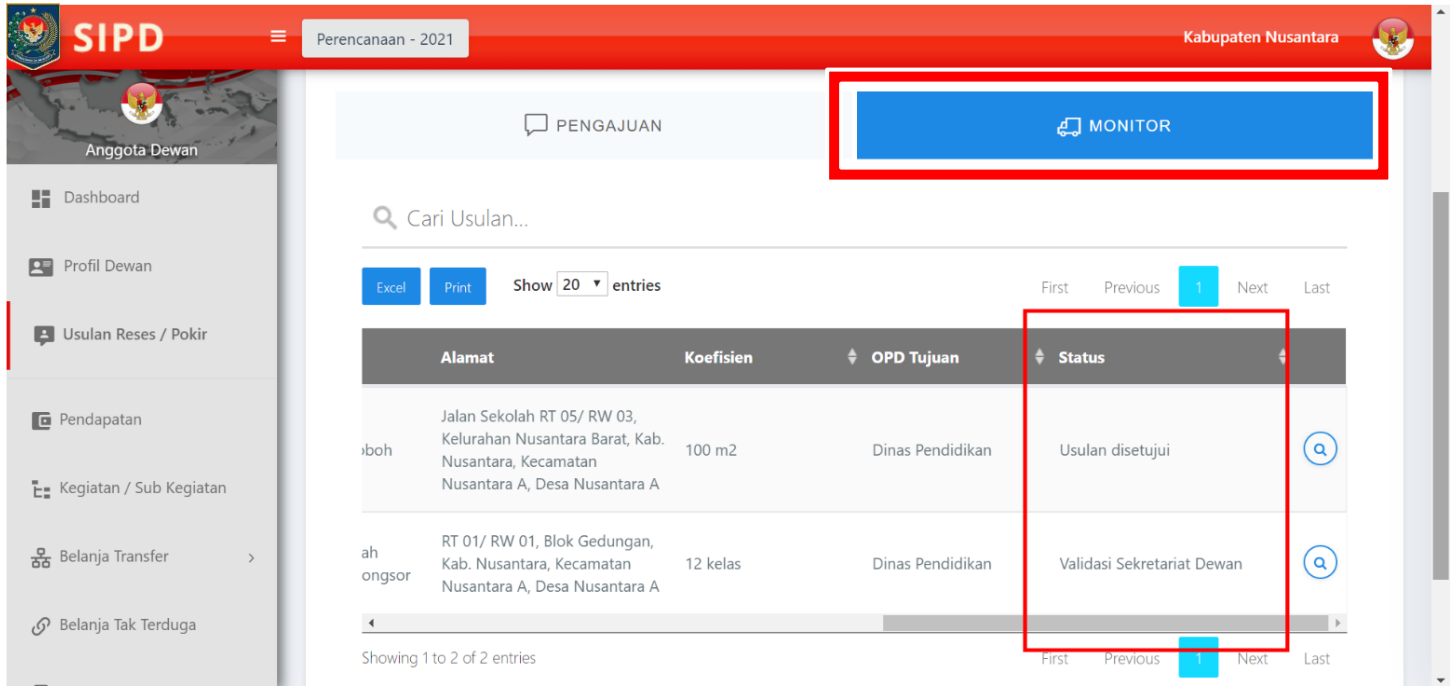

DPRD ZAMAN OLD

- MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN
- TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA REAL-TIME YANG BISA MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI
- FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN METODE MANUAL

DPRD ZAMAN NOW

- MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN
- MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN KOMPREHENSIF
- MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI

TERIMA KASIH